

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Mediatama, Yogyakarta, 2008
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) 1*, Citra Aditya, Bandung, 1992
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/legalisasi>, diakses pada 28 November 2020
- Komar Andasasmita, *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia, 2007
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2004
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Aditya Bakti, Bandung, 2014
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pasal. 1792*, 2001
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Aditya Bakti, Bandung, 1992

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984

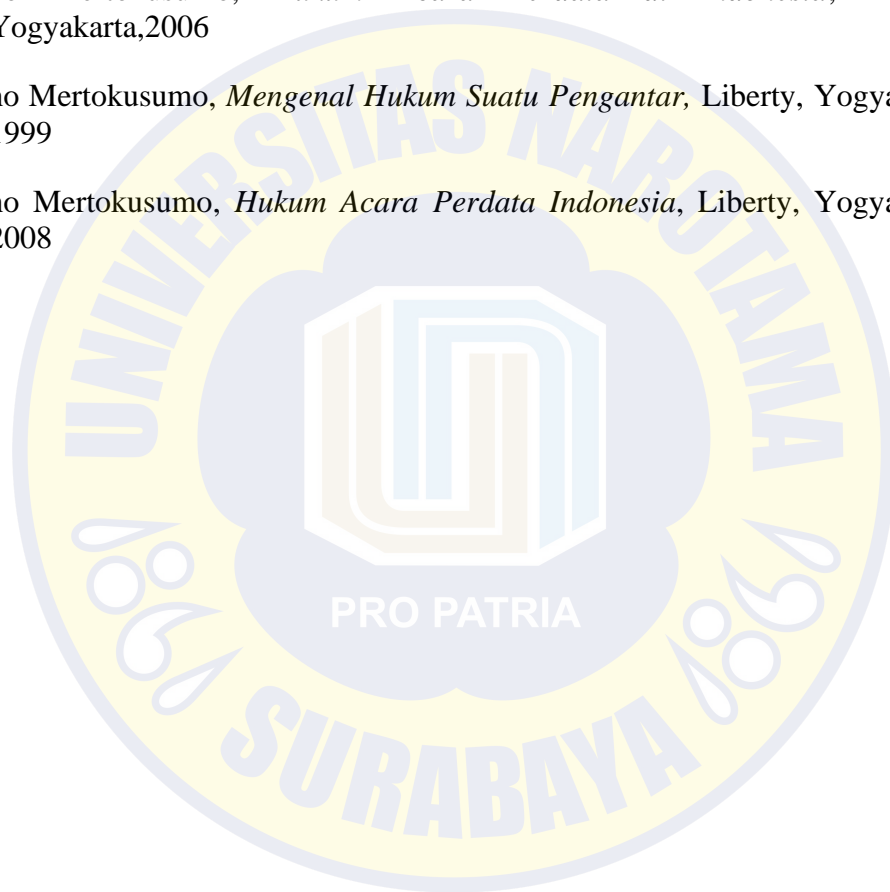
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008



Jurnal:

- Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, 2015
- Endang Purwaningsih, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, Mimbar Hukum Vol. 27, No.1, 2015
- Fariz Rahman Iqbal, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil (Studi Kasus:Perkara nomor 1769/K/Pdt/2011)*, Jurist-Diction Vol 3(1), 2020
- Maman Djafar, *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan Dalam Praktik di Pengadilan*, Lex Privatum Vol III No 4, 2015
- Richard Cisanto Palit, *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*, Lex Privatum Vol. III/No. 2, 2015
- Ryan Bagas Rahardika dan Endang Sri Kawuryan, *Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Transparansi Hukum Vol 1 Nomor 1, 2018
- Vivien Pomantouw, *Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata*, Lex Privatum Vol. VI, No. 7, 2018

Surat Kabar

Philipus M. Hadon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, UI Press, Jakarta, 2004



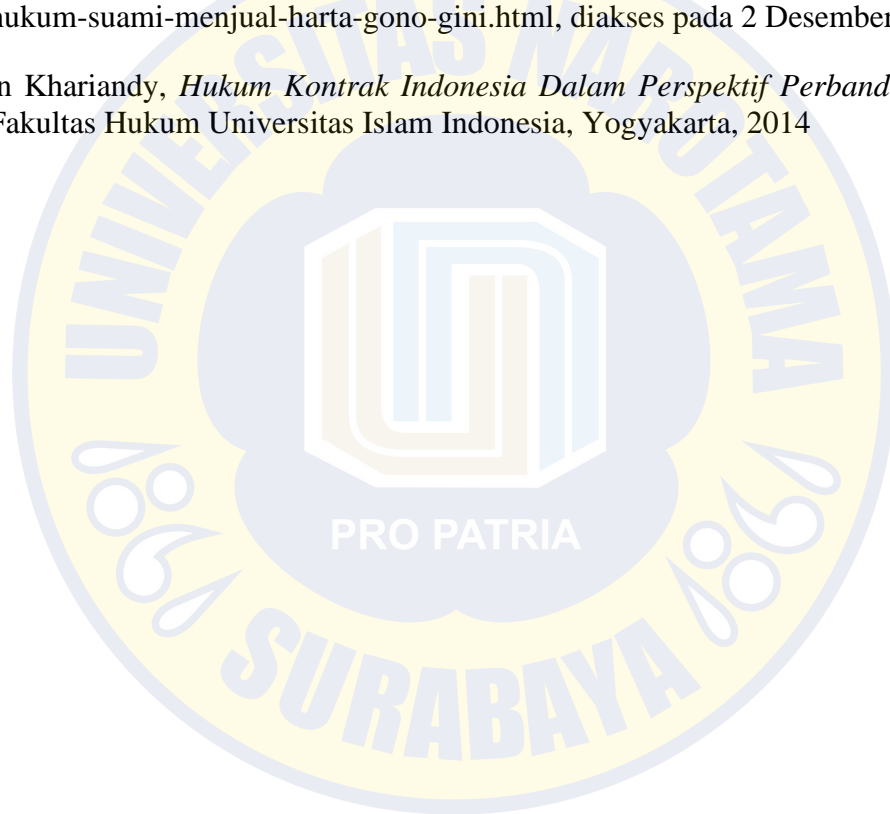
Skripsi/Tesis/Disertasi:

Asfrika Karismawati, *Akibat Hukum dan Upaya Hukum terhadap Akta Notaris yang Cacat Hukum*, FH Unair, 2007

Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

Hery Shietra, *Konsekuensi Hukum Suami Menjual Harta Gono-Gini Tanpa Persetujuan Istri*, <https://www.hukum-hukum.com/2018/04/konsekuensi-hukum-suami-menjual-harta-gono-gini.html>, diakses pada 2 Desember 2020

Ridwan Khariandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014



Media Elektronik:

Ahmad Yani, Merasa Dipersulit Notaris, Mantan Cabup Sidoarjo Ancam Laporan Ombudsman, <https://duta.co/merasa-dipersulit-notaris-mantan-cabup-sidoarjo-ancam-lapor-ombudsman>, diakses pada 10 Desember 2020

Boris Tampubolon, Kemana Mengajukan Gugatan Jika Alamat Tergugat Tidak Diketahui, <http://konsultanhukum.web.id/kemana-mengajukan-gugatan-jika-alamat-tergugat-tidak-diketahui/#:~:text=Secara%20umum%2C%20gugatan%20perdata%20meng,Pengadilan%20Negeri%20dimana%20Tergugat%20tinggal>, diakses pada 16 Desember 2020

Diana Kusumasari, Surat Kuasa Mutlak, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d82ef71dee0a/surat-kuasa-mutlak/>, diakses pada 8 Desember 2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=sengketa%20lahan&cat=5dc631a1c0318c606f8835603566c948>, diakses pada 28 November 2020

Fredrik J Pinakunary, Apakah Harta Bersama Dapat Dijual oleh Suami tanpa Persetujuan Istrinya? <https://fjp-law.com/id/apakah-harta-bersama-dapat-dijual-oleh-suami-tanpa-persetujuan-istrinya/#:~:text=Terkait%20dengan%20hal%20ini%20Mahkamah,sah%20dan%20batal%20demi%20hukum>, diakses pada 2 Desember 2020

Ins/E-3, Kawasan Industri Bertambah 121 pada 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/352237-kawasan-industri-bertambah-121-pada-2020>, diakses pada 26 November 2020

Konsultat Jendral Republik Indonesia, Legalisasi & Surat Keterangan, <https://www.indonesia-frankfurt.de/layanan-konsuler/legalisasi>, diakses pada 28 November 2020

Linda Julaha, Ini Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Waarmerking dan Legalisir, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/21/ini-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-waarmerking-dan-legalisir/>, diakses pada 28 November 2020

Yanita Petriella, Backlog Perumahan, Pengamat : Harus Ada Pembagian Tugas yang Jelas, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200714/47/1265942/backlog-perumahan-pengamat-harus-ada-pembagian-tugas-yang-jelas>, diakses pada 26 November 2020